BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan (http://www.mediaedukasi.com diakses pada tanggal 12 oktober 2022 pukul 21:42).

Kemiskinan merupakan kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Pedomam Umum Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Kementerian Sosial RI 2011:5). Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan pelaksanaan yang tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Kemiskinan adalah salah satu problem sosial yang amat serius. Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehilangan terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar yang berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Mereka yang berada dalam kategori miskin, hidupnya serba kekurangan. Di dalam masyarakat, dapat diketemukan dua macam keadaan : (1) terdapat kemiskinan sekaligus kesenjangan, atau (2) tidak terdapat kemiskinan tetapi boleh jadi masih ada kesenjangan (Badan Pemberdayaan Masyarakat. 2011).

Kemiskinan yang terjadi dalam suatu negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang sangat serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat

Indonesia mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran dalam bekerja. Pengangguran yang dialami sebagian masyarakat inilah yang membuat sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga angka kemiskinan selalu ada (http://www.duniaesai,com mengapa-kemiskinan-di indonesia-menjadi-masalah-berkelanjutan.html diakses pada tanggal 12 oktober 2022 pukul 21:13).

Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan beberapa diantaranya meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat tersebut antara lain adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Kementrian Sosial, dan lain-lain.

Sebagai upaya serius dalam meningkatkan efektifitas penekanan angka kemiskinan, pemerintah telah memiliki konsep penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan basis pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat sebagai subjek penanggulangan kemiskinan bukan objek dengan kata lain pemerintah telah memerhatikan faktor partisipasi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan dalam program pengentasan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan memberdayakan masyarakat, pembangunan nasional terangkai dalam tiga arah kebijakan yang saling mendukung. *Pertama*, kebijakan yang tidak langsung diarahkan pada terciptanya kondisi yang menjamin kelangsungan semua upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, serta penyempurnaan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial-ekonomi

masyarakat. Masuk dalam kebijakan ini adalah penciptaan ketenteraman sosial dan politik, penciptaan iklim usaha, dan stabilitas ekonomi melalui pengelolaan ekonomi mikro yang hati-hati, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan pelestarian lingkungan hidup. *Kedua*, kebijakan langsung diarahkan pada peningkatan peran serta dan produktivitas sumber daya manusia, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, melalui penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan kegiatan sosial ekonomi yang berkelanjutan untuk mendorong kemandirian. Pemenuhan kebutuhan dasar diharapkan dapat memberikan peluang bagi penduduk melakukan kegiatan sosial ekonomi sehingga menghasilkan pendapatan yang memadai. Dalam hubungan ini, pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat diprioritaskan pada kegiatan produktif berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan permodalan yang didukung pelatihan. Kegiatan ekonomi produktif diharapkan dapat menghasilkan nilai tambah lebih tinggi dan pendapatan lebih besar. Dalam tataran ini, pengembangan ekonomi rakyat dilakukan melalui pendekatan kelompok berbentuk usaha bersama. Diharapkan, dengan kelembagaan yang didasarkan pada kebersamaan, kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan kelompok penduduk dapat mendorong terciptanya kemandirian secara berkelanjutan. *Ketiga*, kebijakan khusus diarahkan melalui mekanisme pembangunan daerah dan dikenal sebagai bantuan Inpres. Bantuan ini, yang ditujukan untuk mempercepat peningkatan pemerataan pembangunan, penguatan otonomi, dan desentralisasi pembangunan di daerah. Bantuan diberikan secara terpilih sesuai kebutuhan masyarakat dan kesiapan aparat daerah setempat (Syuib, Aulizul. 2004: 33).

Ada beberapa program pembangunan yang dilaksanakan dengan mekanisme pelaksanaan yang bertumpu pada masyarakat, yaitu bantuan disalurkan langsung kepada masyarakat. Dalam kaitan ini dikembangkan modal pembangunan kelembagaan masyarakat yang berkelanjutan yang merupakan prinsip pembangunan yang partisipatif yaitu upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri dari segenap unsur masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Program tersebut terdiri dari Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan dimantapkan dalam Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), program dilanjutkan dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) (Gunawan, 1999 dalam buku Miar & Rintuh, 2005). Program

Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan masyarakat di pedesaan, dan juga untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Selain Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 juga mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM MANDIRI) yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. (Tim Koordinasi, (Petunjuk Teknis Operasional) program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan).

Sasaran program ini adalah lapisan masyarakatnya yang beragam dari mulai petani, pedagang, pejabat ataupun sopir yang kesemuanya itu mempunyai kebutuhan hidup, sedangkan masyarakat yang mempunyai lahan pertanian dalam desa tersebut tidak begitu dapat memberikan hasil, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup dari sekian banyak profesi diatas maka pekerjaan yang paling dominan untuk usaha mereka adalah berdagang sehingga untuk usaha tersebut mereka meminjam pada bank sebagai modal awal dan juga untuk memajukan usaha kecil mereka demi meningkatkan taraf ekonomi untuk hidup yang lebih baik. Pengembangan masyarakat merupakan salah satu metode pekerja sosial yang tujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, pengembangan masyarakat merujuk pada interaksi aktif antara pekerja sosial dan masyarakat dimana mereka terlibat dalam prosess perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi suatu program pembangunan kesejahteraan sosial (PKS).

Upaya pemerintah terkait pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan adalah membentuk Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui usaha bersama masyrakat dengan melibatkan pemerintah setempat dan pihak swasta secara madiri dan berkelanjutan. Untuk menangani program tersebut, ditingkat kelurahan oleh pemerintah dibentuk kelembagaan masyarakat yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Fungsi BKM yakni untuk membantu masyarakat miskin dalam menghadapi masalah kemiskinan melalui

program pemberdayaan dari pemerintah, agar mereka mampu melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

BKM merupakan suatu lembaga masyarakat yang berbentuk paguyuban dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif ditingkat desa/kelurahan. Peran BKM sebagai lembaga masyarakat yaitu menyalurkan program-program pembangunan sosial atau pemberdayaan masyarakarat kepada masyarakat yang membutuhkan dengan pendekatan partisipatif. BKM secara khusus ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan, dan secara umum ditujukan untuk pembangunan masyarakat kelurahan.

BKM memiliki potensi terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat, karena BKM secara tidak langsung merupakan manifestasi dari masyarakat itu sendiri sehingga lebih memahami permasalahan sosial di masyarakat sekitarnya. Dengan adanya BKM sebagai lembaga masyarakat, sebagai pihak penanggulangan kemiskinan di tingkat kelurahan, diharapkan mampu membangun modal sosial dalam suatu masyarakat agar setiap program bantuan sosial dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain itu BKM sebagai lembaga kemasyarakatan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu merangkul serta mengayomi masyarakat dalam memecahkan setiap permasalahannya. Untuk membantu melaksanakan tugasnya, BKM sendiri membentuk Tim pelaksana untuk membantu dalam setiap kegiatan pembangunan, yakni Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Program dalam BKM sering banyak mengalami hambatan dan kendala dalam hal pengembalian uang dari para nasabah atau peminjam antara lain : (a) Pengembalian macet, telat atau tidak sesuai dari tanggal yang ditentukan dalam musyawarah karena kurangnya kesadaran dari nasabah akan kewajibannya, dan (b) Nasabah tidak mau membayar atau karena belum mempunyai uang sebab mayoritas ibu-ibu atau nasabah tidak memiliki penghasilan yang tetap.. Berdasarkan hasil observasi di atas penulis mencoba melakukan penelitian judul “Pengelolaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “PERMATA” dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1.2.1 Pengembalian sering telat atau tidak sesuai dari tanggal yang ditentukan dalam musyawarah dan anggota belum membayar karena belum mempunyai uang.

1.2.2 Kurangnya kesadaran dari nasabah akan kewajibannya

1.2.3 Masyarakat sebagai anggota peminjam tidak memiliki penghasilan yang tetap.

1.3 Fokus Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah yang sangat penting karena langkah ini akan menentukan kemana suatu penelitian diarahkan. Perumusan masalah pada hakikatnya merupakan perumusan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian (Soehartono, 2008 : 23). Setelah mengetahui dan memahami uraian dari latar belakang masalah diatas maka dirumuskan permasalahannya untuk dikaji lebih dalam lagi. Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu : Bagaimana Pengelolaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “Permata” dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo

1.4 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas, hal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dicari oleh penulis sehingga memberikan arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian.

Berdasarkan permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengelolaan BKM dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan di kelurahan dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi BKM dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

1.5 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Adapun manfaat penelitian tersebut yaitu :

1.5.1 Manfaat Teoritis

a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Untuk membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
c. Dapat digunakan sebagai karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
b. Dapat memberi masukan bagi para pihak yang berkepentingan dan referensi bagi penelitian berikutnya.

1.5.3 Manfaat Bagi Penulis

Kegiatan penelitian ini merupakan langkah awal dari penerapan ilmu pengetahuan dan sebagai pengalaman yang dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.